



## PENETAPAN

Nomor 287/Pdt.P/2023/PA.Blk



### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN AGAMA BULUKUMBA

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Permohonan Pengesahan Nikah yang diajukan oleh:

**PEMOHON 1**, Nomor Induk Kependudukan (NIK) 7302060101870008, usia 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh Bangunan, pendidikan Belum Sekolah, tempat kediaman di KABUPATEN BULUKUMBA, sebagai **Pemohon I**;

melawan

**PEMOHON 2**, Nomor Induk Kependudukan (NIK) 7302066006840002, usia 39 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxx xxxxxxxx, pendidikan Belum Sekolah, tempat kediaman di KABUPATEN BULUKUMBA, sebagai **Pemohon II**;

*Pemohon I dan Pemohon II selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai para Pemohon;*

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar dalil-dalil para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan di persidangan;

### DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonannya tanggal 08 November 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bulukumba Nomor 287/Pdt.P/2023/PA.Blk tanggal 08 November 2023, Pemohon mengajukan permohonan dengan alasan-alasan sebagai berikut:

Hal. 1 dari 13 hal. Penetapan Nomor 287/Pdt.P/2023/PA.Blk



1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah menurut agama Islam pada tanggal 27 Juli 2011 di Dusun Tombolo, Desa Tanah Towa, xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx;
2. Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah Pemohon II pada saat akad nikah, yaitu ayah kandung Pemohon II yang bernama Suddin, yang selanjutnya diwakilkan oleh Imam Desa yang bernama Muhammad Anwar dalam pelaksanaan ijab kabul dengan Pemohon I;
3. Bahwa akad nikah disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi Jumalang dan Utong;
4. Bahwa dalam akad nikah tersebut, Pemohon I memberikan mahar atau maskawin kepada Pemohon II berupa sawah dengan ukuran 15 x 20 m yang terletak di xxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxx, Kecamatan Kajang, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx dan diserahkan secara tunai;
5. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan baik menurut hukum Islam maupun ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta tidak pernah ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
6. Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
7. Bahwa para Pemohon tidak memiliki Buku Nikah karena pada saat menikah yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II tidak mendaftarkan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II di KUA setempat, sehingga pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak terdaftar di KUA setempat. Oleh karena itu Pemohon I dan Pemohon II memohon kepada Pengadilan Agama Bulukumba untuk mengesahkan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
8. Bahwa setelah menikah, Pemohon I dan Pemohon II tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon II di Desa Tanah Towa kemudian pindah ke rumah bersama di xxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxx sampai sekarang dan tidak pernah bercerai. Dari pernikahan tersebut, saat ini Pemohon I dan

Hal. 2 dari 13 hal. Penetapan Nomor 287/Pdt.P/2023/PA.Blk



Pemohon II dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Rama, laki-laki, tempat dan tanggal lahir Bulukumba, 28 Mei 2013, pendidikan Sekolah Dasar (SD);

9. Bahwa, tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan pengesahan nikah ini dengan untuk mendapatkan kepastian hukum tentang sahnyanya pernikahan Pemohon I dan Pemohon II serta hal-hal yang berkenaan dengan penetapan pengesahan nikah tersebut;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bulukumba cq. Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan menetapkan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I, **PEMOHON 1**, dan Pemohon II, **PEMOHON 2**, yang dilaksanakan pada tanggal 27 Juli 2011 di Dusun Tombolo, Desa Tanah Towa, xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx;
3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan pernikahannya pada Kantor Urusan Agama yang mewilayahinya;
4. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex-aquo et bono);

Bahwa atas perintah Ketua Majelis, Jurusita telah mengumumkan permohonan para Pemohon tentang itsbat nikah melalui papan pengumuman Pengadilan Agama Bulukumba selama 14 (empat belas) hari sebelum perkara ini disidangkan. Selama masa pengumuman tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Bulukumba;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon telah hadir sendiri di persidangan;

Hal. 3 dari 13 hal. Penetapan Nomor 287/Pdt.P/2023/PA.Blk



Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa bukti tertulis dan 2 orang saksi sebagai berikut:

#### 1. Bukti Surat

- Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7302061912180001 tanggal 19 Desember 2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas kependudukan dan Catatan Sipil xxxxxxxxx xxxxxxxxx, telah bermeterai cukup, telah dicap pos, dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi kode P.1;
- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I telah bermeterai cukup, telah dicap pos, dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi kode P.2;
- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II telah bermeterai cukup, telah dicap pos, dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi kode P.3;

#### 2. Bukti Saksi

Saksi Pertama **SAKSI 2**, usia 50 tahun, mengaku sebagai Paman Sepupu Pemohon I, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi hadir saat Pemohon I dan Pemohon II menikah;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 27 Juli 2011 di Dusun Tombolo, Desa Tanah Towa, Kecamatan Kajang, xxxxxxxxx xxxxxxxxx;
- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Suddin yang ijab kabulnya diwakilkan kepada Imam Kampung yang bernama Muhammad Anwar;
- Bahwa perkawinan tersebut dihadiri 2 (dua) orang saksi yang beragama Islam dan sudah dewasa bernama Jumalang dan Utong;;

Hal. 4 dari 13 hal. Penetapan Nomor 287/Pdt.P/2023/PA.Blk



- Bahwa Pemohon I menyerahkan mahar kepada Pemohon II berupa sawah dengan ukuran 15 x 20 m dibayar tunai dibayar tunai;
- Bahwa pada saat menikah, Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa saksi tahu antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga dan tidak ada hubungan sesusuan;
- Bahwa selama dalam ikatan perkawinan, Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam dan tidak pernah bercerai serta tidak ada pihak-pihak yang keberatan atas perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II selama ini hidup rukun dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki buku nikah karena imam yang menikahkan tidak melaporkan perkawinan Penggugat dan Tergugat ke Kantor Urusan Agama setempat;
- Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II untuk mengesahkan perkawinannya adalah untuk mendapatkan kepastian hukum tentang sahnyanya pernikahan Pemohon I dan Pemohon II serta hal-hal yang berkenaan dengan penetapan pengesahan nikah tersebut;

Saksi kedua, **SAKSI 3**, usia 48 tahun, mengaku sebagai Paman Pemohon I dan di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi hadir saat Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 27 Juli 2011 di Dusun Tombolo, Desa Tanah Towa, Kecamatan Kajang, xxxxxxxx xxxxxxxx;
- Bahwa saksi tidak mengetahui proses akad nikah karena saksi datang pada acara pernikahan Para pemohon setelah akad nikah dilaksanakan;
- Bahwa sejak Pemohon I dan Pemohon II menikah, keduanya hidup rukun hingga telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama

Hal. 5 dari 13 hal. Penetapan Nomor 287/Pdt.P/2023/PA.Blk



Rama, selain itu keduanya tetap beragama Islam dan tidak pernah bercerai;

- Bahwa selama Pemohon I dan Pemohon II dalam ikatan perkawinan, tidak ada pihak-pihak yang keberatan atas perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II untuk mengesahkan perkawinannya adalah untuk mendapatkan kepastian hukum tentang sahnyanya pernikahan Pemohon I dan Pemohon II serta hal-hal yang berkenaan dengan penetapan pengesahan nikah tersebut;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki buku nikah karena imam yang menikahkan tidak melaporkan perkawinan Penggugat dan Tergugat ke Kantor Urusan Agama setempat;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan dua orang saksi namun hanya saksi I yang mengetahui secara jelas proses ijab Kabul sedangkan saksi II tidak mengetahui sama sekali proses ijab kabul, sehingga olehnya itu Majelis Hakim membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mengucapkan sumpah supletoir yang maksudnya adalah apa yang didalilkan para Pemohon terkait permohonannya adalah benar adanya ;

Bahwa para Pemohon telah mencukupkan bukti-buktinya, kemudian mengajukan kesimpulan bahwa dalil-dalil permohonan para Pemohon telah berdasar hukum untuk dapat dikabulkan, selanjutnya para Pemohon memohon penetapan;

Bahwa untuk lengkapnya uraian fakta serta jalannya pemeriksaan perkara, hal ihwal yang tertuang dalam berita acara sidang ditunjuk sebagai bagian tak terpisah dengan penetapan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan para Pemohon telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Bulukumba selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, selama waktu tersebut tidak ada pihak

Hal. 6 dari 13 hal. Penetapan Nomor 287/Pdt.P/2023/PA.Blk



yang mengajukan keberatan atas permohonan para Pemohon, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini telah sesuai dengan *Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama jo KMA/032/SK/IV/2006 Revisi Tahun 2013*;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon telah datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya, para Pemohon mendalilkan bahwa para Pemohon telah menikah pada tanggal 27 Juli 2011 yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum Islam dan tidak melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku, akan tetapi pernikahan tersebut tidak tercatat di Kantor Urusan Agama karena imam yang menikahkan tidak melaporkan perkawinan Penggugat dan Tergugat ke Kantor Urusan Agama setempat, oleh karenanya, untuk mendapatkan kepastian hukum, para Pemohon memohon agar perkawinannya tersebut dapat disahkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian mengenai pokok permohonan para Pemohon tersebut di atas, dapat dirumuskan pokok masalah dalam perkara ini, yaitu *"Kapan dan di mana para Pemohon melangsungkan perkawinan dan apakah perkawinan tersebut telah memenuhi rukun dan syarat serta tidak melanggar larangan dan halangan perkawinan menurut hukum Islam?"*;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon mengajukan bukti berupa bukti tertulis dan dua orang saksi, selanjutnya Majelis Hakim akan menilai bukti-bukti tersebut sebagai berikut:

Menimbang, bahwa para Pemohon mengajukan bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I, bukti P.2 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II dan bukti P.3 berupa fotokopi Kartu Keluarga atas nama para Pemohon. Bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegeben*) dan aslinya ditunjukkan di muka sidang, sehingga telah memenuhi tata cara pengajuan bukti surat dalam persidangan. Asli bukti tersebut dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang dan sesuai bentuk

Hal. 7 dari 13 hal. Penetapan Nomor 287/Pdt.P/2023/PA.Blk



yang ditetapkan dalam ketentuan perundang-undangan, sehingga berkualifikasi akta autentik. Di dalamnya termuat keterangan tentang identitas Pemohon I yang lahir tanggal 01 Januari 1987 dan Pemohon II yang lahir tanggal 20 Mei 1984, selain itu para Pemohon beragama Islam dan tercatat sebagai penduduk KABUPATEN BULUKUMBA, oleh karena itu segenap dalil yang berkenaan dengan bukti surat tersebut patut dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa para Pemohon juga telah mengajukan bukti 2 (dua) orang saksi yang terhadapnya tidak terdapat suatu halangan formal apapun untuk bertindak sebagai saksi dalam perkara ini, memberi keterangan secara terpisah di muka sidang serta di bawah sumpah, sehingga pengadilan lebih lanjut dapat mempertimbangkan materi keterangan saksi-saksi tersebut;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi para Pemohon memberikan keterangan yang bersesuaian satu sama lain dan bersumber dari pengetahuannya secara langsung perihal peristiwa perkawinan para Pemohon yang dilangsungkan sesuai dengan tata cara agama Islam pada tanggal 27 Juli 2011 di Dusun Tombolo, Desa Tanah Towa, xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx; dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II yang bernama Suddin yang selanjutnya mewakili kepada Imam Kampung, bernama Muhammad Anwar untuk menikahkan para Pemohon. Kedua saksi tersebut juga menerangkan bahwa pada perkawinan para Pemohon dihadiri 2 (dua) orang saksi kawin yang beragama Islam dan sudah dewasa bernama Jumalang dan Utong; dan dalam perkawinan tersebut Pemohon I menyerahkan mahar kepada Pemohon II berupa sawah dengan ukuran 15 x 20 m dibayar tunai dibayar tunai;

Menimbang, bahwa saksi I para Pemohon juga menerangkan bahwa sebelum menikah, Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan. Antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab, semenda dan tidak ada hubungan sesusuan. Selain itu, para Pemohon hingga tetap beragama Islam serta tidak ada pihak-pihak yang keberatan dengan perkawinan para Pemohon sampai sekarang. Adapun para

Hal. 8 dari 13 hal. Penetapan Nomor 287/Pdt.P/2023/PA.Blk



Pemohon tidak memiliki buku nikah karena imam yang menikahkan tidak melaporkan perkawinan Penggugat dan Tergugat ke Kantor Urusan Agama setempat. Dengan demikian, mengacu pada ketentuan Pasal 307 sampai dengan Pasal 309 R.Bg., keterangan saksi I tersebut telah memenuhi syarat materiil pembuktian, sedangkan keterangan saksi II patut di kesampingkan karena tidak mengetahui sama sekali terkait proses ijab Kabul para pemohon;

Menimbang, bahwa walaupun Para Pemohon mengajukan dua orang saksi namun saksi II tidak mengetahui proses ijab Kabul, oleh karena itu Majelis Hakim membebaskan kepada para Pemohon untuk mengucapkan sumpah *suppletoir* sebagai alat bukti tambahan sebagaimana bunyi Pasal 182 R.Bg, sehingga dalil-dalil permohonan Para Pemohon dapat dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan para Pemohon dan bukti-bukti yang diajukan para Pemohon di persidangan maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa para Pemohon melangsungkan pernikahan dengan tata cara agama Islam pada tanggal 27 Juli 2011 di Dusun Tombolo, Desa Tanah Towa, xxxxxxxx xxxxxx, Kabupaten Bulukumba;;
- Bahwa dalam pernikahan tersebut dihadiri oleh para Pemohon, ada ijab kabul, ada wali yaitu ayah kandung Pemohon II yang bernama Suddin, ada 2 (dua) orang saksi kawin yang beragama Islam dan sudah dewasa bernama Jumalang dan Utong; dengan mahar berupa sawah dengan ukuran 15 x 20 m dibayar tunai dibayar tunai;
- Bahwa para Pemohon tetap beragama Islam dan saat melaksanakan perkawinan para Pemohon telah cukup usia kawin;
- Bahwa saat menikah, Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa antara para Pemohon tidak ada hubungan nasab, semenda dan tidak ada hubungan sesusuan;
- Bahwa selama para Pemohon terikat dalam perkawinan, tidak ada orang yang keberatan dengan perkawinan para Pemohon;

Hal. 9 dari 13 hal. Penetapan Nomor 287/Pdt.P/2023/PA.Blk



- Bahwa alasan pernikahan para Pemohon tidak tercatat di Kantor Urusan Agama adalah imam yang menikahkan tidak melaporkan perkawinan Penggugat dan Tergugat ke Kantor Urusan Agama setempat;
- Bahwa Itsbat Nikah para Pemohon dimaksudkan untuk mendapatkan kepastian hukum tentang sahnya pernikahan Pemohon I dan Pemohon II serta hal-hal yang berkenaan dengan penetapan pengesahan nikah tersebut.

Menimbang, bahwa fakta-fakta tersebut di muka menunjukkan bahwa dalam perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II sudah ada mempelai laki-laki dan mempelai perempuan, ada wali nikah bagi mempelai perempuan, ada dua orang saksi dan ada ijab kabul yang dilangsungkan oleh Pemohon I dan imam yang mewakili wali nikah mempelai perempuan, oleh karena itu perkawinan para Pemohon telah memenuhi rukun dalam perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa para Pemohon terbukti beragama Islam selain itu keduanya telah melewati batas minimum usia kawin sesuai ketentuan hukum yang berlaku saat keduanya melangsungkan perkawinan. Dalam persidangan juga tidak terdapat satupun fakta bahwa perkawinan dilangsungkan dengan tanpa adanya persetujuan dari para Pemohon sebagai calon mempelai, dengan demikian Majelis Hakim menilai peristiwa perkawinan Para Pemohon telah memenuhi syarat calon mempelai sebagaimana ketentuan Pasal 15, 16 dan 17 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa yang menjadi wali nikah dalam perkawinan para Pemohon adalah ayah kandung Pemohon II. Kedudukan wali tersebut tergolong wali nasab yang termasuk dalam kelompok kekerabatan paling dekat yang masih hidup. Adapun yang menjadi saksi dari perkawinan para Pemohon ternyata orang-orang muslim yang telah dewasa, oleh karena itu peristiwa perkawinan para Pemohon harus dinyatakan telah memenuhi syarat wali dan saksi nikah sebagaimana yang diatur dalam Pasal 19 sampai dengan 29 Kompilasi Hukum Islam;

Hal. 10 dari 13 hal. Penetapan Nomor 287/Pdt.P/2023/PA.Blk



Menimbang, bahwa di samping syarat yang telah disebutkan sebelumnya, fakta-fakta di persidangan juga menunjukkan bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan perkawinan baik karena pertalian nasab, semenda dan/atau sesusuan. Selain itu Pemohon I tidak sedang terikat perkawinan dengan empat perempuan lain sedangkan Pemohon II tidak sedang terikat perkawinan dengan laki-laki lain dan tidak sedang dalam masa iddah. Oleh karena itu, Majelis Hakim menilai bahwa para Pemohon tidak melanggar halangan dan larangan perkawinan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 8 sampai dengan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 39 sampai dengan Pasal 42 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa sekalipun perkawinan para Pemohon dilaksanakan setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, namun oleh karena perkawinan Pemohon I dan Pemohon II terbukti tidak memiliki halangan perkawinan sehingga termasuk dalam salah satu alasan dibenarkan undang-undang untuk dapat di itsbatkan perkawinannya (*vide* Pasal 7 ayat (3) huruf e Kompilasi Hukum Islam), maka dengan tidak perlu lagi mempertimbangkan alasan tidak tercatatnya perkawinan para Pemohon di Kantor Urusan Agama, Majelis Hakim menilai pengajuan permohonan pengesahan nikah oleh Pemohon telah didasarkan pada itikad baik dan tidak bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan segenap pertimbangan tersebut di muka, Majelis Hakim menilai perkawinan Para Pemohon telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan, tidak melanggar ketentuan mengenai halangan/larangan perkawinan, dan permohonan pengesahannya diajukan dengan itikad baik dan tidak bertentangan dengan hukum, oleh karenanya petitum angka 2 (dua) permohonan para Pemohon perihal permohonan untuk mengesahkan perkawinan para Pemohon **patut dikabulkan**, yaitu dengan menyatakan sah perkawinan para Pemohon yang dilangsungkan pada tanggal 27 Juli 2011 di Dusun Tombolo, Desa Tanah Towa, xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx;;

Hal. 11 dari 13 hal. Penetapan Nomor 287/Pdt.P/2023/PA.Blk



Menimbang, bahwa untuk tertibnya pencatatan perkawinan, maka sesuai maksud dan kehendak Pasal 8 ayat (2), Pasal 35 huruf a, dan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 jo. Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, serta memperhatikan ketentuan Pasal 22 Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2018 tentang Pencatatan Perkawinan, maka Pemohon I dan Pemohon II diperintahkan untuk mencatatkan perkawinannya pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kindang xxxxxxxx xxxxxxxx yang mewilayahi tempat kediaman Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa permohonan pengesahan nikah ini diajukan secara *voluntair*, oleh karena itu biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II sebagai pengaju perkara;

Memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

#### MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I, **PEMOHON 1**, dan Pemohon II, **PEMOHON 2**, yang dilaksanakan pada tanggal 27 Juli 2011 di Dusun Tombolo, Desa Tanah Towa, Kecamatan Kajang, xxxxxxxx xxxxxxxx;
3. Memerintahkan para Pemohon untuk mencatatkan perkawinannya tersebut pada Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx;
4. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.370.000,00 (satu juta tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian penetapan ini diucapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Bulukumba pada hari Senin tanggal 11 Desember 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Jumadil Awwal 1445 Hijriah oleh Dra. Sitti Johar, M.H. sebagai Ketua Majelis, Muslindasari, S.Sy., M.H. dan Indriyani Nasir, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan

Hal. 12 dari 13 hal. Penetapan Nomor 287/Pdt.P/2023/PA.Blk



tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Marlina, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

**Muslindasari, S.Sy., M.H.**

**Dra. Sitti Johar, M.H.**

**Indriyani Nasir, S.H.**

Panitera Pengganti,

**Marlina, S.H.**

Perincian biaya:

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Biaya Proses	: Rp	100.000,00
- Panggilan	: Rp	1.200.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	10.000,00
J u m l a h	Rp	1.370.000,00

(satu juta tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah).